

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 1992, *Prosedur Penelitian*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2017, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Effendie, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *PPAT Sejarah dan Kewenangannya*, Majalah RENVOI, Nomor 844, IV, Januari 2007.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.
- HS., Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ismaya, Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Lubis, M. Yamin dan Lubis Abd. Rahim, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Marbun, S.F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parlindungan, A.P. (selanjutnya disebut A.P. Parlindungan), 1991, *Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, CV Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Praktek Jual Beli Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saputra, M. Nata, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan *Burgerlijk Wetboek* Stb. 1847 Nomor 23;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan menteri Negara Agraria (PMNA)/ Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

### **C. Tesis dan Jurnal**

Aini, Nurul, 2018, Analisis Kebijakan Manajemen Karier dan Promosi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Tesis, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Herlindah, 2007, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Blanko Akta PPAT Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang PPAT, Tesis Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jatnika, Dicky, 2010, Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara, Tesis Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kusumaning, 2014, Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Dengan Kinerja PPAT Di Kota Yogyakarta, Tesis, Magister kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Larasati, Luh Devy, 2016, Freies Ermessen Dinas Pendapatan Daerah Tentang Verifikasi Nilai Objek Pajak Dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Badung, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mulyadi, Yosi Andika, 2016, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Di hadapan Notaris Dalam Perkara Pidana, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prastiwi, Elizabeth, 2005, Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sebagai Pembina Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan di Daerah Hukumnya, Tesis Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wibowo, Richo Andi, 2017, *Preventing Maladministration in Indonesia Public Procurement (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with The Netherlands and The United Kingdom)*, Disertasi, Universitas Utrecht, Belanda.

Zulhaq, Akbar, 2009, Akibat Hukum Penggunaan Formulir/Blanko Pada Pembuatan Akta PPAT Terhadap Kedudukan PPAT Sebagai Pejabat Umum Dalam Pendaftaran Tanah, Tesis, Magister kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

#### **D. Internet**

<https://meraukekab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2018&Publikasi%5BkataKunci%5D=&yt0=Tampilkan> Diakses pada hari Kamis 25 Juli 2019, pukul 14.00 WIB

<http://www.merauke.go.id/portal/news/view/2/sejarah.html> diakses pada hari Selasa 9 Juli 2019 pukul 20.00 WIB

[https://eprints.uns.ac.id/30502/1/S351402020\\_pendahuluan.pdf](https://eprints.uns.ac.id/30502/1/S351402020_pendahuluan.pdf) diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 13.00 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/1003-ID-proses-integrasi-irian-barat-ke-dalam-nkri.pdf> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB